



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG**



**KANTOR CAMAT ILE BOLENG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya serta dukungan dari semua unsur Aparatur Kecamatan Ile Boleng maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Ile Boleng tahun 2023 merupakan laporan yang dibuat setiap tahun sebagai bahan evaluasi Camat dalam mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) baik tingkat Kabupaten maupun Propinsi.

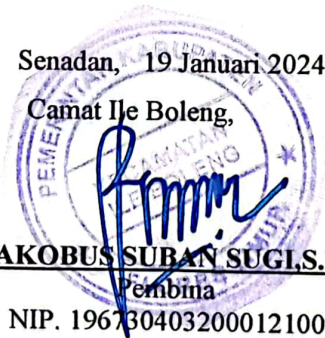
Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ile Boleng pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas segala partisipasi dalam menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng ini menjadi acuan dalam tugas dan fungsi pelayanan kita kepada masyarakat.

Terima kasih .

Senadan, 19 Januari 2024

Camat Ile Boleng,


YAKOBUS SUBAN SUGLS.Pt.

Pembina
NIP. 1967304032000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.4. Data Umum Daerah.....	3
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	7
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	11
3.2. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Program.....	16
3.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	17
BAB.IV. PENUTUP.....	18
4.1. Kesimpulan.....	18
4.2. Saran.....	19

PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban Konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada ayat 69 (1) bahwa Kepala Daerah Wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah dimana secara teknis dan substansi penyusunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 no. 126, Tambahan LNRI no. 4438).
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 No.244, Tambahan LNRI No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 no. 26, Tamabahan LNRI no.5589).
3. Undang - Undang no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI tahun 2014 bno. 292, Tambahan LNRI No. 5061).
4. PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 No. 165, Tambahan LNRI No. 4593).
5. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI tahun 2007 no. 82, Tambahan LNRI no.4737).
6. PP Nomor 60 Ttahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127)
7. PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Perda Kabupaten Flores Timur no. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten flores Timur (LD tahun 2016 no. 11 Tambahan LD no.0140).

9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Flores Timur kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.
11. Surat Bupati Flores Timur, Nomor : Pem.130/01/Kjsm.OTDA/2024, tanggal 05 Januari 2024 tentang Permintaan Data LPPD dan LKPJ Tahun 2023.

1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka Penyusunan LKPJ sebagai Pencapaian Kinerja Laporan, maka semua ini tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah yakni : ***“Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata”***, dengan 5 Misi yaitu :

1. Selamatkan Orang Muda
2. Selamatkan Infrastruktur
3. Selamatkan tanaman Rakyat
4. Selamatkan Laut
5. Reformasi Birokrasi

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Flores Timur Sejahtera*** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. ***Desa Membangun Kota Menata*** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. ***Selamatkan Orang Muda Flores Timur:*** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. ***Selamatkan Infrastruktur Flores Timur :*** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. ***Selamatkan Tanaman Rakyat flores Timur:*** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. ***Selamatkan Laut Flores Timur :*** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. ***Reformasi Birokrasi :*** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government.

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Ile Boleng berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai akhir dalam Pencapaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka kondisi terakhir tidak maksimal pencapaian karena dampak Virus Corona 19 yang melanda, khususnya di Kabupaten Flores Timur.

1.4.Data Umum Daerah

1. Data Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 08 Tahun 2004, wilayah Ile Boleng yang sebelumnya berstatus sebagai perwakilan kecamatan Adonara Timur ditetapkan sebagai kecamatan definitif dengan nomenklatur Kecamatan Ile Boleng sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi 21 (dua puluh satu) Desa, yaitu : Lewokeleng, Bedalewun, Lewat, Nihaone, Dokeng, Bungalawan, Lewoblolong, Bajutaa, Lamawolo, Helanlangowuyo, Lewopao, Harubala, Nobo, Boleng, Gayak, Nelelamawangi II, Duablolong, Lamabayung, Nelelamawangi, Neleblolong, dan Nelelamadike

Secara Geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Boleng

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Boleng

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Witiama

sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Adonara Timur.

Keadaan topografi bervariasi seperti daratan lembah perbukitan dan lereng gunung serta tinggi dari permukaan laut terdiri dari :

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1. | 0 – 5 m | : 8,74 km ² |
| 2. | 5 – 25 m | : 16 km ² |
| 3. | 25 – 100 m | : 15,20 km ² |
| 4. | 500 - 100 m | : 19 km ² |
| 5. | 100 – 1500 m | : 13 km ² |
| 6. | 1500m | : 23 km |
| 7. | Kawah Gunung Ile Boleng | : 1.596m |

Kecamatan Ile Boleng beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 400-500 mm/tahun.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan Layanan kemasyarakatan Pemerintah Kecamatan Ile Boleng didukung dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kecamatan Ile Boleng baik instansi Vertikal otonom dan BUMN/BUMD yang ditempatkan pada wilayah termasuk penempatan personil PNS maupun Tenaga Kontrak Daerah serta Pihak Keamanan. Selama ini kerjasama yang terjalin cukup baik.

**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN ILE BOLENG
TAHUN 2023**

No.	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Ketr.
			L	P	Jlh	L	P	Jlh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bedalewun	2.00	322	351	673	139	62	201	
2	Lebanuba	2.34	363	399	762	158	77	235	
3	Lcwoblolong	1.11	155	209	364	69	50	119	
4	Bungalawan	2.86	343	435	778	164	76	240	
5	Lamawolo	5.07	684	786	1470	319	159	478	
6	Helanlangowuyo	5.70	1329	1364	2693	560	213	773	
7	Lewopao	4.65	884	934	1818	356	147	503	
8	Gayak	1.44	157	181	338	76	31	107	
9	Boleng	2.86	579	634	1213	232	126	358	
10	Neleblolong	1.29	226	265	491	110	64	174	
11	Duablolong	2.11	433	453	886	188	89	277	
12	Lewokeleng	3.02	292	306	598	130	45	175	
13	Nelelamawangi	1.79	206	233	439	90	52	142	
14	Harubala	2.20	302	359	661	153	78	231	
15	Nelelamadike	2.14	623	660	1283	273	110	383	
16	Lamabayung	2.53	516	552	1068	213	78	291	
17	Lewat	2.00	265	285	550	123	36	159	
18	Dokeng	2.23	157	167	324	59	24	83	
19	Bayuntaa	1.01	203	205	408	86	37	123	
20	Nobo	1.44	299	325	624	120	70	190	
21	Nelelamawangi II	1.60	191	230	421	97	36	133	
	JUMLAH		8529	9333	17862	3715	1660	5375	

2. Jumlah ASN

Jumlah ASN pada Kantor Camat Ile Boleng adalah : 18 orang yang terdiri dari :

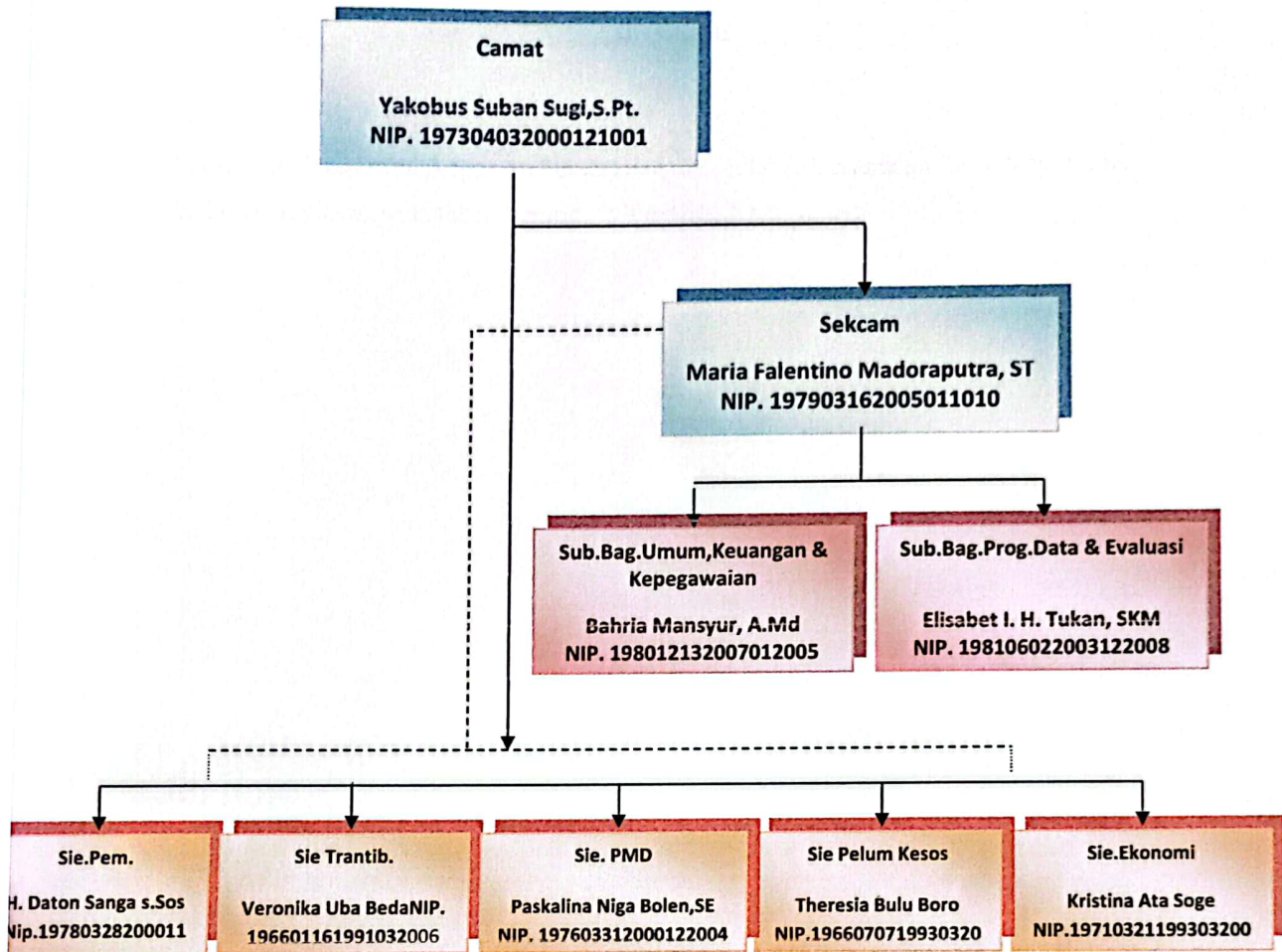
Pejabat Struktural Eselon III.b : 2 orang

Pejabat Struktural Eselon IV.a : 2 orang

Pejabat Struktural Eselon IV.b : 5 orang

Fungsional Umum : 9 orang

STRUKTUR ORGANISASI PNS KANTOR CAMAT ILE BOLENG



BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Ile Boleng Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut : (TABEL. 2.1.)

Tabel 2.1.
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DPA AWAL	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	REALISASI	%	SISA PAGU
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	36.004.600	- 8.995.400	35.868.767	100	135.833
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	12.000.000	- 3.000.000	11.958.000	100	42.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	8.000.000	- 2.000.000	7.964.000	100	36.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	8.002.300	- 1.997.700	7.945.000	99	57.300
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	8.002.300	- 1.997.700	8.001.767	100	533
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000	19.200.000	4.200.000	18.129.000	94	1.071.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7.200.000	7.200.000	7.200.000	100	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	12.000.000	- 3.000.000	10.929.000	91	1.071.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-	4.999.500	100	500
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	-	4.999.500	100	500

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DPA AWAL	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	REALISASI	%	SISA PAGU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.992.271	89.993.021	-18.999.250	89.992.797	100	224
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.497.978	1.497.978	-	1.497.978	100	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.999.943	12.000.693	-2.999.250	12.000.693	100	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.499.350	7.499.350	-	7.499.350	100	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	100	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	7.500.000	-17.500.000	7.499.776	100	224
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	13.500.000	-1.500.000	13.500.000	100	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.995.000	42.995.000	3.000.000	42.995.000	100	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	562.380	562.380	-	562.380	100	-
	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	562.380	562.380	-	562.380	100	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.570.000	46.170.000	-26.400.000	46.159.807	100	10.193
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	100	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.970.000	9.970.000	-	9.959.807	100	10.193
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.600.000	35.200.000	-26.400.000	35.200.000	100	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	DPA AWAL	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	REALISASI	%	SISA PAGU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.172.150	19.669.600	5.497.450	19.669.600	100	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.188.750	4.188.750	-	4.188.750	100	-
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan lainnya	9.983.400	15.480.850	5.497.450	15.480.850	100	-
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	35.000.000	28.000.000	7.000.000	28.000.000	100	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	28.000.000	7.000.000	28.000.000	100	-
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.760.000	38.760.000	-	37.040.000	96	1.720.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	38.760.000	38.760.000	-	37.040.000	96	1.720.000
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	44.999.175	44.999.175	-	44.999.175	100	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	100	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.999.175	19.999.175	5.000.000	19.999.175	100	-
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.214.628.807	1.347.935.565	133.306.758	1.199.050.266	89	148.885.299
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.184.628.807	1.325.135.565	140.506.758	1.176.250.266	89	148.885.299
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	22.800.000	7.200.000	22.800.000	100	-
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.489.700	14.437.500	6.052.200	14.437.500	100	-
	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	20.489.700	14.437.500	6.052.200	14.437.500	100	-
	Jumlah	1.615.174.483	1.690.731.841	75.557.358	1.538.908.792	91	151.823.049

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
(Tabel. 3.1.)

Tabel. 3.1.
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg.	Target		Realisasi		% Capaian	Sisa Anggaran
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KANTOR CAMAT ILE BOLENG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		36.004.600		35.868.767	100%	135.833
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	11.958.000	100%	42.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	7.964.000	100%	36.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8.002.300	6 Laporan	7.945.000	99%	57.300
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	8.002.300	2 laporan	8.001.767	100%	533
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.200.000		18.129.000	94%	1.071.000
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	7.200.000	4 Dokumen	7.200.000	100%	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	10.929.000	91%	1.071.000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.000.000		4.999.500	100%	500
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	5.000.000	2 laporan	4.999.500	100%	500

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg.	Target		Realisasi		% Capaian	Sisa Anggaran
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		89.993.021		89.992.797	100%	224
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.497.978	1 Paket	1.497.978	100%	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	12.000.693	1 Paket	12.000.693	100%	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	7.499.350	1 Paket	7.499.350	100%	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	100%	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.499.776	100%	224
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.500.000	12 Laporan	13.500.000	100%	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.995.000	12 Laporan	42.995.000	100%	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		562.380		562.380	100%	-
				Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Paket	562.380	1 Paket	562.380	100%	-

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg.	Target		Realisasi		% Capaian	Sisa Anggaran
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46.170.000		46.159.807	100%	10.193
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	100%	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	9.970.000	12 Laporan	9.959.807	100%	10.193
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	35.200.000	12 Laporan	35.200.000	100%	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19.669.600		19.669.600	100%	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	4.188.750	8 Unit	4.188.750	100%	-
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	15.480.850	1 unit	15.480.850	100%	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		28.000.000		28.000.000	100%	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.000.000	12 Laporan	28.000.000	100%	-

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg.	Target		Realisasi		% Capaian	Sisa Anggaran
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		38.760.000		37.040.000	96%	1 720 000
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	38.760.000	12 Dokumen	37.040.000	96%	1 720 000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		44.999.175		44.999.175	100%	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	63 Dokumen	25.000.000	63 Dokumen	25.000.000	100%	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	19.999.175	1 Dokumen	19.999.175	100%	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.347.935.565		1.199.050.266	89%	148 885 299
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.325.135.565	18 orang/bulan	1.176.250.266	89%	148 885 299
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	22.800.000	4 Dokumen	22.800.000	100%	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.437.500		14.437.500	100%	-
				Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Paket	14.437.500	1 Paket	14.437.500	100%	-
				JUMLAH		1.690.731.841		1.538.908.792	91%	151.823.049

3.2. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Program.

Kecamatan Ile Boleng sebagaimana Kecamatan pada umumnya di Kabupaten Flores Timur memiliki 8 (delapan) Program Kegiatan

Kedelapan Program Kegiatan tersebut terdapat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program apabila ditinjau dari sisi kuantitatif Pagu Anggaran Program dengan Kegiatan.

Akan tetapi ditinjau dari sisi kualitatif Kegiatan tentu masih terdapat kekurangan karena Pagu Anggaran Program tidak mencukupi membiayai kegiatan-kegiatan dengan berbagai Dinamika Permasalahan yang ada di wilayah.

Berdasarkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tabel 3.1. di atas maka dapat dianalisa kesesuaian antara Kegiatan dengan target kinerja Program untuk tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja anggaran : Rp. 38.004.600

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 35.868.767

Rasio pencapaian : 100 %

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja anggaran : Rp. 1.347.935.565

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 1.199.050.266

Rasio pencapaian : 89 %

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :

Target Kinerja anggaran : Rp. 89.993.021

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 89.992.797

Rasio Pencapaian : 100 %

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target Kinerja Anggaran : Rp. 46.170.000

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 46.159.807

Rasio Pencapaian : 100 %

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target Kinerja Anggaran : 14.437.500

Realisasi Program Kegiatan : 14.437.500

Rasio Pencapaian : 100 %

6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit

Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Target Kinerja Anggaran : Rp. 28.000.000

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 28.000.000

Rasio Pencapaian : 100 %

7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Target Kinerja Anggaran : 38.760.000
Realisasi Pelaksanaan Program : 37.040.000
Rasio Pencapaian : 96 %

8. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Target Kinerja Anggaran : Rp. 44.999.175
Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 44.999.175
Rasio Pencapaian : 100 %

3.3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)

3.4. Kebijakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Boleng ini disusun dengan maksud memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng selama Tahun 2023 kepada Para Stakeholder di Kabupaten Flores Timur, untuk dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dalam menilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng, demi perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain:

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Hal tersebut di atas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 memerlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif: Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (Penegakan Hukum, Akuntabilitas dan Professional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
4. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
5. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

4.2. Saran

Memperhatikan isi Laporan ini , maka kendala-kendala yang dihadapi tersebut serta upaya/langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Ile Boleng;
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur pelaksana Program dan Kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.
7. Diperlukan merehabilitasi gedung Kantor Camat yang saat ini terasa kurang memadai lagi karena tidak dapat menampung para pegawai dalam melaksanakan tugas. Atau dilakukan perluasan gedung agar semua pegawai yang bekerja di kantor camat dapat tertampung dalam ruang kerja dan nyaman dalam melaksanakan akitvitas.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tingkat Kecamatan Ile Boleng ini dibuat dan tentunya masih ada kekurangan yang harus di sempurnakan pada masa yang akan datang. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan/usul saran dan pertimbangan dari Bapak Bupati untuk perbaikan dan kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bagian dari Laporan yang tergabung dengan SKPD lainnya.

Sekian dan terima kasih.

Senadan, 19 Januari 2024

Camat Ile Boleng,


YAKOBUS SUBAN SUGL, S.Pt.

FPmbina

NIP.19730403 200012 1 001.